

**PELANGGARAN PRINSIP *NON-REFOULEMENT* DALAM
KEBIJAKAN *OPERATION SOVEREIGN BORDERS*
AUSTRALIA PADA MASA PEMERINTAHAN PM TONY
ABBOTT**

SKRIPSI

Oleh:

Claudia Constancia Diwi Ngadha
2070750067



**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**PELANGGARAN PRINSIP *NON-REFOULEMENT* DALAM
KEBIJAKAN *OPERATION SOVEREIGN BORDERS*
AUSTRALIA PADA MASA PEMERINTAHAN PM TONY
ABBOTT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

Claudia Constancia Diwi Ngadha
2070750067



**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Claudia Constancia Diwi Ngadha

NIM : 2070750067

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Peminatan : Pembangunan Politik, Hukum dan Keamanan Berkelanjutan

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "PELANGGARAN PRINSIP *NON-REFOULEMENT* DALAM KEBIJAKAN *OPERATION SOVEREIGN BORDERS AUSTRALIA* PADA MASA PEMERINTAHAN PM TONY ABBOTT" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 25 Juni 2024

(Claudia Constancia Diwi Ngadha)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
PELANGGARAN PRINSIP *NON-REFOULEMENT* DALAM KEBIJAKAN
OPERATION SOVEREIGN BORDERS AUSTRALIA PADA MASA
PEMERINTAHAN PM TONY ABBOTT

Oleh:

Nama : Claudia Constancia Diwi Ngadha
NIM : 2070750067
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Peminatan : Pembangunan Politik, Hukum dan Keamanan Berkelanjutan
telah dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir dan sudah diperiksa dan disetujui
guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hubungan
Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen
Indonesia,

Jakarta, 25 Juni 2024

Menyetujui:

Pembimbing

Ketua Program Studi
Ilmu Hubungan Internasional

(Prof., Angel Damayanti, S.IP., M.Si.,
M.Sc., Ph.D.)
0324107703



(Arthur Jeverson Maya, S.Sos.,
M.A.)
0312018601



PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada 25 Juni 2024 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Claudia Constancia Diwi Ngadha

NIM : 2070750067

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Peminatan : Pembangunan Politik, Hukum dan Keamanan Berkelanjutan

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "PELANGGARAN PRINSIP *NON-REFOULEMENT* DALAM KEBIJAKAN *OPERATION SOVEREIGN BORDERS AUSTRALIA* PADA MASA PEMERINTAHAN PM TONY ABBOTT" oleh tim penguji yang terdiri dari:

	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1	Dra. V.L Sinta Herindrasti, MA.	,Sebagai Ketua	
2	Darynaufal Mulyaman, S.S., M.Si.	,Sebagai Anggota	
3	Prof., Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D.	,Sebagai Anggota	

Jakarta, 25 Juni 2024



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN PERBAIKAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

Nama : Claudia Constancia Diwi Ngadha
NIM : 2070750067
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Peminatan : Pembangunan Politik, Hukum dan Keamanan Berkelanjutan
Judul Skripsi : Pelanggaran Prinsip *Non-Refoulement* dalam Kebijakan *Operation Sovereign Borders* Australia pada Masa Pemerintahan PM Tony Abbott

Telah memperbaiki Skripsi sesuai dengan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi sebagaimana tertulis dalam "Berita Acara Hasil Ujian Skripsi" pada tanggal 25 Juni 2024

Jakarta, 12 Juli 2024

Menyetujui:

Ketua Sidang/Penguji I

(Dra. V.L Sinta Herindrasti,
MA.)

Penguji II

(Darynaufal Mulyaman, S.S.,
M.Si.)

Penguji III

(Prof., Angel Damayanti,
S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D.)

Ketua Program Studi
Ilmu Hubungan Internasional

(Arthur Jefferson Maya,
S.Sos., M.A.)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Claudia Constancia Diwi Ngadha

NIM : 2070750067

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul : Pelanggaran Prinsip *Non-Refoulement* dalam Kebijakan *Operation Sovereign Borders* Australia pada Masa Pemerintahan PM Tony Abbott

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal
Yang menyatakan



Claudia Constancia Diwi Ngadha

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan judul “Pelanggaran Prinsip *Non-Refoulement* dalam Kebijakan *Operation Sovereign Borders* Australia pada Masa Pemerintahan PM Tony Abbott”.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir penulis untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia (FISIPOL UKI).

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis juga menyadari banyaknya tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, dan masih terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan penulis. Namun demikian, penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar dan tepat waktu berkat bantuan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak berikut:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melindungi dan memberkati penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Orang tua dan keluarga tersayang, yang selalu memberi dukungan dan nasihat sehingga penulis dapat termotivasi untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.

3. Diri sendiri, karena tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan yang ada selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku Rektor UKI.
5. Dr. Verdinand Robertua, M.Soc.Sc., selaku Dekan FISIPOL UKI.
6. Arthuur Jeverson Maya, S.Sos., M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional UKI.
7. Prof., Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sangat penulis hormati. Dengan arahan dan dukungan beliau, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Dra. V.L Sinta Herindrasti, MA, selaku Dosen Pembimbing Proposal Skripsi dan Dosen Penguji I dalam Sidang Skripsi.
9. Darynaufal Mulyaman, S.S., M.Si., selaku Dosen Penguji II dalam Sidang Skripsi.
10. Adrianus Lengu Wene, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Penguji dalam Sidang Proposal Skripsi.
11. Risky Oktavian, S.IP., M.A, selaku Dosen Pengampu dalam Mata Kuliah Seminar Proposal Skripsi.
12. Edy Prasetyono, S.Sos., MIS., Ph.D., selaku Narasumber dalam Wawancara untuk melengkapi data penelitian skripsi ini.
13. Teman-teman yang telah membantu, memberi dukungan, kebersamaan selama perkuliahan dan selama penulis menyusun skripsi ini; Bryan Astro Julio, Diki Wahyudi, Maria Glaydista, Natanya Mikha, Novensius Zagoto, Helveria Santa, dan Yeremia Richardo.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya secara satu persatu, yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang terlibat. Semoga Tuhan memberkati.

Jakarta, 25 Juni 2024



Claudia Constancia Diwi Ngadha



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
PERSETUJUAN PERBAIKAN TUGAS AKHIR	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Akademis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN	8
2.1 Tinjauan Pustaka	8
2.2 Kerangka Teoritik	20
2.2.1 Keamanan Nasional	20
2.2.2 <i>Non-Refoulement</i>	22
2.3 Kerangka Alur Pemikiran	25
2.4 Hipotesis	27
2.5 Metode Penelitian	27
2.5.1 Ruang Lingkup Penelitian	28
2.5.2 Tipe Penelitian	29
2.5.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data	29
2.5.4 Teknik Validasi Data	30
2.5.5 Teknik Analisa Data	30

BAB III KEBIJAKAN <i>OPERATION SOVEREIGN BORDERS</i> (OSB) DALAM MENANGANI PENCARI SUAKA AUSTRALIA	33
3.1 Isu Pencari Suaka di Australia.....	33
3.1.1 <i>Migration Act</i> 1958.....	37
3.2 Kebijakan <i>Operation Sovereign Borders</i> (OSB).....	39
3.2.1 Implementasi Kebijakan OSB	40
3.2.2 Dampak Penerapan Kebijakan OSB.....	44
BAB IV PERLINDUNGAN KEAMANAN NASIONAL AUSTRALIA	47
4.1 Pelanggaran terhadap Prinsip <i>Non-Refoulement</i> dalam Kebijakan OSB.....	47
4.2 Respons Dunia Internasional.....	52
4.3 Alasan Pemerintah Australia Mempertahankan Kebijakan OSB	59
4.3.1 Mengurangi Tindakan Kriminal.....	60
4.3.2 Melindungi Keamanan Nasional dan Perbatasan	62
4.3.3 Mengurangi Jumlah Kedatangan Perahu Pencari Suaka	64
4.3.4 Mencegah Kematian di Laut	65
4.4 Keberlanjutan Kebijakan OSB pada Pemerintahan Berikutnya.....	72
BAB V PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Rekomendasi	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN I <Daftar Wawancara>.....	87
LAMPIRAN II <Pedoman Wawancara>	88
LAMPIRAN III <Transkrip Wawancara>	90
LAMPIRAN IV <Dokumentasi Foto Wawancara>	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Tinjauan Pustaka.....	17
Tabel 2.2	Sumber dan Metode Pengumpulan Data	29
Tabel 3.1	Jumlah Pencari Suaka di Australia.....	35
Tabel 3.2	Jumlah Kedatangan Perahu Pencari Suaka Tahun 2009-2012 ...	36
Tabel 4.1	Jumlah Kapal yang Dikembalikan pada Tahun 2013-2015	50
Tabel 4.2	Jumlah Kedatangan Perahu Pencari Suaka selama Periode PM Tony Abbott	64
Tabel 4.3	Jumlah Kematian terkait Pengawasan Perbatasan Australia Tahun 2009-2015	67
Tabel 4.4	Detail Kematian di Pusat Penahanan Imigrasi Australia.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Poster <i>No Way Australia</i>	43
Gambar 3.2	Poster <i>Zero Chance</i>	43



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Kerangka Alur Pemikiran.....	26
-----------	------------------------------	----



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Jumlah Kematian selama Perjalanan Tidak Teratur ke Australia Tahun 2009-2015	66
------------	---	----



DAFTAR SINGKATAN

DIBP	<i>Department of Immigration and Border Protection</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
HI	Hubungan Internasional
JATF	<i>Joint Agency Task Force</i>
OSB	<i>Operation Sovereign Borders</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PM	Perdana Menteri
PNG	<i>Papua New Guinea</i>
SAR	<i>Search and Rescue</i>
TPV	<i>Temporary Protection Visa</i>
UNHCR	<i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Daftar Wawancara.....	87
Lampiran II	Pedoman Wawancara	88
Lampiran III	Transkrip Wawancara	90
Lampiran IV	Dokumentasi Foto Wawancara.....	95



ABSTRAK

Australia sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi 1951 terkait pengungsi dan pencari suaka tentunya memiliki kewajiban untuk mematuhi setiap ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut, salah satunya adalah prinsip *non-refoulement* yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat diusir atau dipulangkan ke negara asalnya jika nyawa dan kebebasan mereka terancam, dan dengan demikian berlaku bagi semua negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951. Namun mengingat kedatangan pencari suaka yang semakin meningkat, maka pemerintah Australia membuat beberapa kebijakan yang diharapkan dapat mengurangi arus kedatangan pencari suaka dan melindungi keamanan perbatasan, salah satunya adalah kebijakan *Operation Sovereign Borders* (OSB). OSB merupakan kebijakan yang diresmikan oleh Australia di bawah pemerintahan PM Tony Abbott pada tahun 2013 dengan penegasan bahwa pencari suaka ilegal yang tiba di Australia dengan perahu tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan izin menetap di negara tersebut. Dalam penerapannya, kebijakan OSB dinilai melanggar prinsip *non-refoulement* karena mengusir dan mengembalikan perahu yang mengangkut pencari suaka kembali ke negara asalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan mengapa Australia melanggar prinsip *non-refoulement* dalam penerapan kebijakan OSB. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keamanan nasional dan konsep *non-refoulement*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif yang diharapkan dapat menjelaskan mengapa Australia melanggar prinsip *non-refoulement* dalam kebijakan OSB. Temuan dari penelitian ini adalah Australia berupaya melindungi keamanan nasionalnya melalui kebijakan OSB untuk mengurangi tindakan kriminal, melindungi keamanan perbatasan, mengurangi jumlah perahu, dan mengurangi angka kematian di laut. Australia berani mengesampingkan bahkan melanggar kewajibannya internasionalnya sebagai ratifikator Konvensi 1951 demi mengutamakan kepentingannya untuk menjaga kedaulatan perbatasan dan keamanan nasionalnya.

Kata Kunci: Australia; *Non-Refoulement*; Keamanan Nasional; Pencari Suaka; Kebijakan *Operation Sovereign Borders*.

ABSTRACT

Australia as one of the countries that ratified the 1951 Convention regarding refugees and asylum seekers certainly has an obligation to comply with every provision contained in the convention, one of which is the principle of non-refoulement which confirms that a person cannot be expelled or returned to their country of origin if their life and liberty are lost. they are threatened, and thus apply to all countries that have ratified the 1951 Convention. However, considering the increasing arrival of asylum seekers, the Australian government has made several policies which are expected to reduce the flow of arrivals of asylum seekers and protect border security, one of which is the Operation Sovereign policy Borders (OSB). OSB is a policy launched by Australia under the government of PM Tony Abbott in 2013 with the assertion that illegal asylum seekers who arrived in Australia by boat were not given the opportunity to obtain permission to remain in the country. In its implementation, the OSB policy is considered to violate the principle of non-refoulement because it expels and returns boats carrying asylum seekers back to their countries of origin. This research aims to explain the reasons why Australia violates the principle of non-refoulement in implementing the OSB policy. The theories used in this research are national security theory and the concept of non-refoulement. The research method used is a qualitative method with an explanatory type of research which is expected to explain why Australia violated the non-refoulement principle in the OSB policy. The findings of this research are that Australia seeks to protect its national security through OSB policies to reduce criminal acts, protect border security, reduce the number of boats, and reduce the number of deaths at sea. Australia dares to ignore and even violate its international obligations as a ratifier of the 1951 Convention in order to prioritize its interests in maintaining its border sovereignty and national security.

Keywords: Australia; Non-Refoulement; National Security; Asylum Seeker; Operation Sovereign Borders Policy.